

KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI PREVENSI

KEJAHATAN TERHADAP ANAK

(Studi terhadap Peran Bapermas di Kabupaten Klaten)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

FAIZ FAJRUL FATHULOH

C 100 140 169

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI PREVENSI
KEJAHATAN TERHADAP ANAK
(Studi terhadap Peran Bapermas di Kabupaten Klaten)

PUBLIKASI ILMIAH
Oleh :
FAIZ FAJRUL FATHULOH
C 100 140 169

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :
Dosen Pembimbing



(Kuswardhani, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI PREVENSI
KEJAHATAN TERHADAP ANAK
(Studi terhadap Peran Bapermas di Kabupaten Klaten)

Oleh :

FAIZ FAJRUL FATHULOH

C 100 140 169

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari : Sabtu, 29 September 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Kuswadani, S.H.,M.Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Sudaryono, S.H.,M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Muchamad Iksan S.H.,M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Juni 2018

Penulis



FAIZ FAJRUL FATHULOH

NIM: C. 100. 140. 169

**KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI PREVENSI
KEJAHATAN TERHADAP ANAK
(Studi terhadap Peran Bapermas di Kabupaten Klaten)**

Abstrak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, namun pada kenyataannya sering dijumpai kejahatan terhadap anak. Dengan demikian Klaten sebagai kota layak anak mempunyai tujuan untuk mewujudkan Klaten sebagai kota layak anak melalui peran dari Bapermas. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana regulasi pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap anak? (2) Bagaimana peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Klaten sebagai langkah konkret dalam mencegah kejahatan terhadap anak?. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah regulasi pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kota layak anak diatur di dalam berbagai undang-undang dari UUD RI 1945 hingga peraturan daerah kabupaten Klaten. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Klaten adalah dengan mengadakan program-program yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak seperti sosialisasi, pembentukan sekolah ramah anak, puskesmas layak anak dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Anak, Bapermas, Kota layak anak.

Abstrack

The child is a mandate as well as a gift from God Almighty, which we must always guard because in him is inherent the dignity, dignity and rights as human beings that must be upheld, but in fact often encountered crimes against children. Thus Klaten as a child-friendly city has the aim to realize Klaten as a child-friendly city through the role of Bapermas. The problem formulation in this thesis is (1) What is the regulation of the Klaten Regency government in realizing a child-friendly city in order to prevent crime against children? (2) What is the role of the Community Empowerment Agency in Klaten District as a concrete step in preventing crime against children?. The results of this thesis are the regulation of the Klaten Regency government in realizing a child-friendly city regulated in various laws from the 1945 Constitution of 1945 to the regional regulations of Klaten district. The role of the Agency for Community Empowerment in Klaten Regency is to conduct programs that ultimately aim to realize a child-friendly city such as socialization, the formation of child-friendly schools, child-friendly health centers and so on.

Keywords: Son, Bapermas, child-friendly city.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia

yang harus dijunjung tinggi.¹ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.²

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.³

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak sebagaimana diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Berdasarkan jumlah kasus kejahatan terhadap anak di daerah Klaten yang seiring bertambahnya tahun semakin meningkat maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai peran pemerintah Klaten dalam mewujudkan Kota Layak Anak di daerah Klaten. Berkaitan dengan penulisan ini, maka penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA).

¹ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, (Januari, 2017), hlm. 83

² Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 14

³ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. (1) Bagaimana regulasi pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap anak? (2) Bagaimana peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Klaten sebagai langkah konkret dalam mencegah kejahatan terhadap anak?

Tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (a) Untuk menjelaskan regulasi pemerintah di Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap anak. (b) Untuk mendeskripsikan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Klaten sebagai langkah konkret dalam mencegah kejahatan terhadap anak. Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut. (a) Menambah wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai kebijakan dan regulasi dalam rangka mewujudkan kota layak anak di Kabupaten Klaten. (b) Menambah pemahaman dan wawasan terkait peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Klaten dalam menanggulangi kejahatan anak di Kabupaten Klaten.

2. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.⁴ Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten dan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. (a) Data Primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian. (b) Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dan observasi, Studi lapangan atau wawancara. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat.⁵

⁴ Suratman dan Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 47

⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap anak

Berikut ini adalah regulasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten sebagai acuan dalam mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap anak yaitu sebagai berikut

3.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap anak pemerintah Kabupaten Klaten mengacu kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.⁶ Maka oleh karena itu berikut ini penulis akan menguraikan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjadi dasar undang-undang lain di bawahnya dalam mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap anak oleh Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta anak mendapatkan perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 28C UUD 1945 ayat (1) dan (2)

Dalam pasal ini tidak secara spesifik mencantumkan kata “anak” namun pasal tersebut dapat dimasukkan dalam regulasi terhadap anak. Anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yaitu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuannya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya serta membantu meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan dirinya sendiri semua masyarakat negaranya.

⁶ Natangsa Surbakti, 2012, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 112.

c. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

Pasal ini menyebutkan secara spesifik mencantumkan kata “anak” namun setiap orang dipasal tersebut dapat memberikan pengertian apabila semua orang termasuk anak maupun orang dewasa yang dimana memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

d. Pasal 28 I UUD 1945 ayat (1) dan (2)

Di dalam pasal ini dijelaskan terkait dengan berbagai hak yang melekat pada seseorang baik itu anak atau orang dewasa, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak yang lainnya. Dengan demikian pasal-pasal tersebut dapat dijadikan menjadi dasar untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

3.1.2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-undang tersebut mengacu pada landasan normatif bahwa ada Dua konsepsi mengenai perlindungan anak. Terkait dengan definisi umum Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2016, Sebagaimana yang telah diruaikan sebelumnya terkait dengan pasal-pasal di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di dalam undang-undang perlindungan anak ini penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2016 Jadi dengan dicantumkannya asas dan tujuan dalam undang-undang tersebut jelas undang-undang tersebut dibuat dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif dalam rangka melindungi hak-hak anak dengan tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Pasal 10 UU Nomor 17 Tahun 2016. Khusus dalam partisipasi mereka dalam proses pembangunan, undang-undang ini secara tegas mengakui hak anak untuk

menyatakan pendapatnya, seperti termuat dalam pasal diatas. Di dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai macam-macam hak anak yang berupa anak yang berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan dan kepatuhan.

Pasal 24 UU Nomor 17 Tahun 2016. Pasal diatas memuat mengenai jaminan hak-hak anak tersebut perlu pelaksana perlindungan yang dilakukan. Pemerintah dan Negara disini adalah pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat disini adalah Presiden Republik Indonesia. Yang apabila di kaitkannya dengan pelaksanaan dibebankan kepada Kementrian sosial. Dan kemudian oleh kementrian memberikan tugas kepada dinas-dinas di pemerintahan daerah.

Dalam kaitannya di atas pasal 1 angka 7 menjelaskan mengenai pengertian anak yang menyandang cacat dan dalam undang-undang yang baru diganti menjadi pengertian anak penyandang disabilitas. Dalam pasal 1 angka 12 menjelaskan mengenai hak anak, dalam undang undang baru diperjelas dengan hak anak yang dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan Khusus sendiri Pasal 1 angka 15 menjelaskan mengenai perlindungan khusus. Dengan demikian kekerasan atau kejahatan terhadap anak dapat diartikan sebagai pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh anak. Maka dengan dampak yang begitu besar Undang-Undang perlindungan anak ini merupakan regulasi yang mendukung dan menjadi acuan pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap anak.

3.1.3 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak

Dalam membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak Kabupaten Klaten membuat Peraturan daerah mengenai perlindungan anak. Dalam undang-undang ini dibuat dengan segala kegiatannya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Prinsip dasar hak adak terdapat dalam pasal 2 ayat (2):

a. Non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut adalah agar Pengaturan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang melindungi anak dan keluarga yang meliputi sistem pencegahan dan penanganan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran atau pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Kemudian di dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak di dalam Pasal 5. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak yang dimana merupakan system pencegahan dan penanganan terhadap bentuk kejahatan terhadap anak, yang dilakukan melalui berbagai layanan yaitu yang diatur dalam beberapa ketentuan yaitu:

Pasal 7: Layanan primer adalah layanan berupa keikutsertaan masyarakat dalam upaya perlindungan anak, kesadaran masyarakat tentang pelanggaran hak anak dan juga kewajiban melindungi anak, kemampuan mendidik anak, penghukuman anak, pencegahan kejahatan terhadap anak, penyelesaian kasus anak, dan juga partisipasi anak.

Pasal 8: Layanan sekunder adalah layanan yang lebih bersifat represif yaitu penanganan apabila telah terjadi kasus terhadap anak.

Pasal 10: Layanan Tertier hampir sama dengan layanan sekunder perbedaanya hanya di dalam kasus posisi anak dimana di layanan tersier ini anak sudah terlibat hukum, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku.

3.1.4 Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam peraturan Bupati Klaten ini merupakan suatu komitmen Kabupaten Klaten untuk mendorong setiap desa menjadi Desa Layak Anak. komitmen tersebut

yaitu alokasi dana desa untuk kepentingan terciptanya desa layak anak yang kemudian akan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kejahatan terhadap anak.

Di dalam peraturan bupati ini terdapat aspek-aspek pemberdayaan dan juga aspek pembangunan desa. Yang menjelaskan apabila dana yang ada dan sudah dialokasikan untuk desa harus digunakan salah satunya untuk memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan anak. hal tersebut dimaksudkan agar setiap desa di dorong untuk mewujudkan desa layak anak.

Yang kemudian dengan adanya peraturan bupati Klaten tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan dari segi dana keuangan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan terciptanya Kota layak Anak di Kabupaten Klaten. dan diharapkan dengan adanya dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat maka dapat mewujudkan setiap desa di Klaten menjadi Desa yang layak anak.

Selain regulasi yang ada didalam peraturan perundang-undang, penulis telah melakukan wawancara terhadap kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Klaten Jaka Purwanto, mengatakan apabila perlindungan terhadap anak juga dilakukan dengan perlindungan diluar Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut⁷

a. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disebut sebagai KHA adalah kesepakatan PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁸

b. PNBAI 2015 (Program Nasional Bagi anak Indonesia)

PNBAI 2015 (Program Nasional Bagi anak Indonesia) adalah program kesejahteraan dan perlindungan anak yang mencakup empat bidang:⁹ (1) Kesehatan Anak; (2) Pendidikan Anak; (3) Perlindungan Anak; (4) Penanggulangan HIV/AIDS.

c. TESA 129

⁷Jaka Purwanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 09:00 WIB.

⁸ <http://bankdata.kpai.go.id/regulasi-terkait-anak>

⁹ Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi

TESA 129 yaitu Telpon Sahabat Anak 129 adalah suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa (telepon rumah.kantor) untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau dalam situasi darurat maupun anak-anak yang membutuhkan layanan konseling.

d. Bina Keluarga Balita

Bina Keluarga Balita yang disebut BKB adalah gerakan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang anak umur 0-5 tahun.

3.2 Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Klaten sebagai langkah konkret dalam mencegah kejahatan terhadap anak

Dalam mewujudkan pencegahan kejahatan terhadap anak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak, yaitu dengan adanya lembaga Badan Pemberdayaan Masyarakat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa. Yang dimana dengan adanya lembaga tersebut diharapkan oleh pemerintah dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat yang salah satunya adalah kejahatan terhadap anak yang sering terjadi.

3.2.1 Tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Klaten jl. Teratai, Pondok, Klaten, Klaten TENGAH, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

a. Tugas dan fungsi

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas sebagaimana dimaksud tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut. 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 4) Pelaksanaan

administrasi Dinas. dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

b. VISI dan Misi

Badan Pemberdayaan Masyarakat memiliki Visi Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia sejahtera dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, kebutuhan pangan menuju masyarakat partisipatif dan mandiri. dan Misi Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, Mengembangkan pelaksanaan pengurustamaan hak anak di berbagai bidang pembangunan.

3.2.2 Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten dalam mencegah kejahatan terhadap anak

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menanggulangi kejahatan terhadap anak sangat vital karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas yang paling dekat dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Berikut ini penulis akan uraikan masing-masing peran tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pencegahan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan kekerasan terhadap anak

Pencegahan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan kekerasan terhadap anak ini dilakukan oleh Badan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu seperti kampanye anti kekerasan, stop kekerasan terhadap anak, sekolah warga untuk perlindungan anak, dan sosialisasi terhadap pemerintah daerah, seperti kampanye anti kekerasan, Stop kekerasan terhadap anak, Sekolah warga untuk perlindungan anak.

b. Melakukan penanganan kasus ketika anak sedang menjadi saksi, korban atau pelaku kejahatan

Penanganan kasus ini merupakan bentuk pencegahan yang represif yaitu ketika suatu kejahatan sudah terjadi. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat membedakan menjadi tiga perbedaan anak yaitu anak sebagai korban, pelaku dan menjadi saksi.

Pertama, ketika anak menjadi korban, Badan pemberdayaan Masyarakat akan memberikan pendampingan agar anak tersebut tidak mengalami trauma, agar hak-hak anak yang sudah dilanggar agar dapat dipulihkan. Berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan restitusi dan juga rehabilitasi.

Kedua, ketika anak sebagai pelaku, Badan Pemberdayaan Masyarakat, akan melakukan pendampingan dan juga akan mengupayakan restorative justice system yaitu dengan melakukan diversi, agar-agar hak anak tidak dilanggar dengan hukuman pemenjaraaan atau kurungan.

Ketiga, ketika anak sebagai saksi, Badan Pemberdayaan Masyarakat akan melakukan pendampingan, menyediakan akomodasi kepada anak ketika menjadi saksi dan mendampingi anak agar tidak dilanggar hak-haknya ketika menjadi saksi.

c. Pemberdayaan terhadap anak

Program pemberdayaan terhadap anak dilakukan dengan tujuan agar korban dapat kembali lebih aktif lagi berinteraksi di dalam masyarakat. Dalam hal ini Badan pemberdayaan Perempuan melakukan kegiatan dengan pemberian keterampilan kepada kelompok PKK tingkat kelurahan hingga tingkat Kabupaten.

d. Pembentukan lembaga atau program

Pembentukan lembaga atau program disini merupakan upaya pencegahan kejahatan terhadap anak dengan menggunakan peran masyarakat, perhatian terhadap kesehatan anak, dan lingkungan anak baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Berikut adalah program-program yang dibuat oleh badan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:

e. Pembentukan Desa Layak Anak

Desa Layak Anak sendiri di Kabupaten Klaten baru 13 Desa Layak anak dari 391 desa di Kabupaten Klaten, angka ini masing sangat kecil oleh karenanya dinas masih berusaha keras untuk menambah desa layak anak. tiga belas desa layak anak yaitu meliputi: Desa Somorejo dan desa Trotok di Kecamatan Wedi; Desa Paseban dan Banyuripan Kecamatan Bayat; Kelurahan Jonggongan, Klaten Tengah; dan seterusnya.

f. Pembentukan puskesmas layak anak

Bentuk dari Puskesmas layak anak sendiri yaitu berupa melengkapi fasilitas puskesmas. Dengan lengkapnya fasilitas anak ini diharapkan dapat menjadi hiburan anak yang sedang sakit agar tidak takut apabila di ajak ke puskesmas. Selain itu juga dari pihak puskesmas melakukan sosialisasi perlindungan anak ketika terjadi imunisasi anak, bagaimana penanganan anak yang nakal dan hal-hal yang berkaitan dengan anak itu sendiri.

Badan Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan dinas Kesehatan yaitu puskesmas untuk menyediakan layanan dalam hal anak yang telah menjadi korban kejahatan agar mau diperiksa di puskesmas. Sosialisasi yang dilakukan pihak puskesmas memberikan kesadaran terhadap para orang tua agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak, edukasi seperti ini penting guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak.

g. Pembentukan sekolah ramah anak

Di Kabupaten Klaten sendiri Sekolah Rumah Anak terdapat 30 Sekolah dan akan terus dikembangkan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Sekolah Rumah Anak tersebut sangat banyak diantaranya adalah sosialisasi ke anak, guru, kepala sekolah, pendampingan ke sekolah-sekolah untuk membuat media pencegahan kekerasan dan kegiatan lain yang diintegrasikan guna mewujudkan kabupaten Klaten yang layak anak.

Menurut penulis dalam hal kaitannya sekolah ramah anak ini sangat strategis sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak atau kejahatan terhadap anak, karena selama ini sering terjadi kekerasan di dalam lingkup sekolah baik antara murid satu dengan murid yang lainnya, murid dengan guru bahkan murid dengan orang tua murid.

Dengan Demikian penulis berkesimpulan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten klaten dalam mencegah kejahatan terhadap anak telah dilakukan dengan baik dengan melakukan kegiatan-kegiatan baik itu sosialisasi, kampanye atau penanganan secara langsung dan juga membentuk suatu program-program yang merepresntasikan anak. Dengan demikian Badan pemberdayaan Masyarakat sangat berperan penting dalam hal penanggulangan kejahatan terhadap

anak. dengan adanya bapermas dapat terwujudnya kota layak anak di Kabupaten Klaten. walaupun belum sepenuhnya semua terwujud namun tetap diperlukan dukungan dari pihak lain yaitu polisi, masyarakat, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, dan juga pemerintah desa, dan pihak-pihak lain yang terlibat.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *Pertama*, terkait dengan Regulasi pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap anak diatur di dalam (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, Pasal 28C UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I UUD 1945. (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak. (4) Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain regulasi yang ada didalam peraturan perundang-undang perlindungan terhadap anak juga dilakukan dengan Konvensi Hak Anak, PNBAI 2015, TESA 129, Bina Keluarga Balita. *Kedua*, Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Klaten sebagai langkah konkret dalam mencegah kejahatan terhadap anak adalah mewujudkan Kota Layak anak tersebut dengan menurunkan tingkat kejahatan terhadap anak, pemantauan ketahanan keluarga dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di daerah. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Klaten yaitu upaya pencegahan dengan melakukan berbagai upaya yaitu upaya Pre-Emtif, Preventif dan juga Represif.

Dalam Skripsi ini penulis memberikan saran yaitu *Pertama*, Untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten, agar melaksanakan upaya

penanggulangan kejahatan terhadap anak dengan semaksimal mungkin. agar Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat memberikan peran yang signifikan dalam upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak. *Kedua*, untuk Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Klaten agar mendukung kinerja Badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten dengan mengikuti sosialisasi-sosialisasi dan juga menerapkan ilmu yang didapat agar anak-anak dapat terlindungi dan terhindar dari kejahatan. *Ketiga*, untuk Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mendukung pelaksanaan kota layak anak di Kabupaten Klaten dan juga memberi dorongan kepada badan Pemberdayaan Masyarakat Klaten agar dapat mewujudkan dan meningkatkan perlindungan terhadap anak.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Ibu Kuswadhani, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, (2001), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Jhonny, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Kobandaha, Mahmudin, (2017), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, (Januari, 2017).
- Philips dan Suratman, (2012), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Setiawan, Marwan, (2015), *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Surbakti, Natangsa, (2012), *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<http://bankdata.kpai.go.id/regulasi-terkait-anak>

Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi